



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : W21- 674 .KP.04.01 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NUSA TENGGARA BARAT**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dipandang perlu melakukan pemindahan dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemindahan dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Tahun 1977 No.11) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 No.193);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Memutuskan : ....*



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, di pindahkan dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 26 Juni 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH,



**Drs. ANDI DAHRIF RAFIED, M.Si.**  
NIP. 19600912 198003 1 001



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,  
u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Direktur Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
6. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
8. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar;
12. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram;
13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar;
14. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu;
15. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram;
16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
17. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima;
18. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya;
19. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Selong;
20. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
21. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : W21-674.KP.04.01 TAHUN 2019

TANGGAL : 26 Juni 2019

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / (GOL. RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	BAIQ YULIAN WINDARI, S.E. 19870706 201212 2 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pelaksana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
2.	M. DENI ZULSANTIKA, A.Md.Kep. 19861228 200912 1 004	Penata Muda (III/a)	Perawat Mahir Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
3.	MIN AMWAL 1983111231 200212 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
4.	YULIADI RAHMAT 19870716 200601 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB
5.	SAHABUDIN 19850509 200912 1 006	Pengatur (II/c)	Asisten Pembimbing Masyarakat Terampil Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa Besar	Asisten Pembimbing Masyarakat Terampil pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram
6.	LAODE MUHAMMAD SAID AMUN, A.Md.IP. 19930523 201608 1 001	Pengatur (II/c)	Pelaksana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
7.	TAUFAN ADRITYANTO 19841023 201012 1 004	Pengatur (II/c)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Selong
8.	UMAR HAKIM MASRI 19910928 201012 1 001	Pengatur (II/c)	Pelaksana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
9.	LALU ADITYA DWI HARTANTO 19860815 201212 1 002	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pelaksana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB
10.	SATRIA JUNIAWAN UTAMA 19930624 201212 1 001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pelaksana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB
11.	BAGAS AKBAR AZNURINTO 19970806 201712 1 002	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram



NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / (GOL. RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
12.	AHMAD 19920316 201712 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu
13.	I MADE ANDY PERMANA PUTRA 19971006 201712 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya
14.	INDRA SAPUTRA 19921207 201712 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar
15.	MUHAMMAD RYAN PRATAMA 19970305 201712 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya
16.	REDI PUTRA 19910502 201712 1 005	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar
17.	NI WAYAN RIANA KOSALA DEWI 19900903 201712 2 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
18.	NADA KARINA SARINASTITI 19980224 201712 2 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
19.	YUNIAR PRATIWI 19980629 201712 2 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
20.	DIAH ANGGRAINI VITALOKA 19970517 201712 2 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
21.	DHIYA`ULHAQ SAFITRI 19980130 201712 2 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
22.	DINA ARISKA 19940408 201712 2 004	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram



a.n. **KEMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIC INDONESIA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH,**

**Dis. ANDI DAHRIF RAFIED, M.Si.**  
 NIP. 19600912 198003 1 001